
ANALISIS KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENANGGULANGAN TINGKAT KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Andi Elmy Ferawaty M^{1*}, Andi Patimbangi, S.Pd., M.Pd.²

Prodi Ekonomi Syariah IAIN Bone

¹andielmyferawaty@gmail.com, ²andipatimbangi@yahoo.com

ABSTRAK

Kemiskinan adalah sebuah masalah sosial yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah. Yang tentunya masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan berdampak pada masalah lainnya seperti angka pengangguran yang akan meningkat. Hal ini perlunya penanggulangan dari Pemerintah Daerah dalam penanggulangan tingkat kemiskinan yang ada dalam masyarakat disuatu daerah. Masalah yang akan dibahas oleh peneliti dalam tulisan ini adalah untuk menganalisis serta mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terhadap upaya penanggulangan tingkat kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upaya penanggulangan tingkat kemiskinan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mengurai data yang telah didapatkan secara deskriptif. Pada teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga hal: Pertama, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone melalui program-program penanggulangan tingkat kemiskinan yang meliputi PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan pemberdayaan UMKM. Kedua, pada proses pelaksanaan upaya penanggulangan tingkat kemiskinan terdapat berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Ketiga, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan yang berdasarkan dalam perspektif ekonomi islam. Perspektif Ekonomi Islam yang dimaksud adalah kesesuaian pemerintah dalam membantu masyarakat yang sejalan dengan ekonomi islam.

Kata Kunci: *kebijakan; pemerintah; kemiskinan*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah secara konsisten membuat kebijakan-kebijakan dalam upaya mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dan meminimalisir tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana ada kegagalan untuk mengatasi masalah mendasar seperti makanan, pakaian, tempat perlindungan, sekolah, dan kesejahteraan. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang utama di negara-negara tertentu seperti Indonesia. Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke membuat tingkat penduduknya sangat tinggi sehingga menyebabkan tingginya permintaan terhadap kebutuhan hidup setiap harinya. Namun, kebutuhan tersebut tidak dipenuhi oleh keluarga miskin.

Kemiskinan adalah suatu masalah yang besar di setiap negara bahkan di daerah, itu karena kemiskinan memiliki dampak yang luar biasa terhadap masyarakat dan negara. Mengenai penanggulangan tingkat kemiskinan, yang menjadi fokus tujuannya yaitu bagaimana bentuk penanggulangan untuk meningkatkan pendapatan yang merata dan akses yang lebih kepada masyarakat untuk dapat memperoleh pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lainnya. Indonesia telah mencatat jumlah penduduk miskin oleh Badan Pusat Statistika, yang dimana pada empat tahun berturut-turut dari tahun 2016-2019 mengalami tren penurunan jumlah penduduk miskin secara berurutan. Hal tersebut merupakan suatu pencapaian yang baik. Berbeda ditahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan angka sebesar 0,97% yakni 27,55 juta. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk miskin meningkat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mempengaruhi angka kemiskinan.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang masih menghadapi persoalan kemiskinan. Meski menjadi salah satu provinsi yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang cukup baik, angka kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan masih terbilang cukup tinggi. Merujuk kepada angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki ibu kota Makassar. Yang dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebesar 796,81 ribu jiwa. Lalu mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019, yakni 779,64 ribu jiwa dan 759,58 ribu jiwa. Dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2020 menjadi 800,24 ribu jiwa, yang dimana daerah perkotaan memiliki persentase tingkat kemiskinan yang tinggi yakni 0,70% dibandingkan dengan pedesaan yakni 0,35%. Penyebab kenaikan angka kemiskinan karena pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap aktivitas dan pendapatan masyarakat. Akibatnya banyak pekerja yang di PHK.

Beralih ke Kabupaten Bone, salah satu kabupaten terluas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dimana pertumbuhan ekonomi juga menjadi permasalahan yang serius dalam menanggulangi tingkat kemiskinan. Pada data Badan Pusat Statistika: Kabupaten Bone dalam Angka 2021, pada tahun 2016-2018 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone mengalami tren kenaikan. Di tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebesar 75,09 ribu jiwa (10,07%), lalu pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin yaitu 77,13 ribu jiwa (10,28%). Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 79,57 ribu jiwa (10,55%). Mengingat dalam kurung waktu lima tahun terakhir dari periode tahun 2016-2020 hanya ditahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Bone mengalami penurunan, menjadi 76,25 ribu jiwa (10,05%). Sedangkan pada tahun 2020 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone turun drastis dari 7,01% menjadi minus 0,25%, mencapai 81,33 ribu jiwa. Yang dimana persentase penduduk miskin mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada angka 10,68 persen dari total penduduk Kabupaten Bone, lagi-lagi dikarenakan akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi, pendapatan rumah tangga, dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone masih saja sering mengalami naik turun dan sampai pada tahun lalu berada pada kenaikan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan suatu kebijakan agar laju pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan disamping itu peningkatan kualitas sumber

daya manusia dan untuk sumber daya alam yang melimpah tersebar di seluruh daerah Indonesia, juga dalam islam terdapat himbauan untuk bekerja serta belanja hanya khusus untuk kebutuhan primer.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field reseach). Dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke tempat penelitian, dengan subjek penelitian Anggota DPRD Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Bone terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini bersifat deskriptif karena menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Bone dalam menanggulangi tingkat kemiskinan berdasarkan perspektif ekonomi islam.

Jenis data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Untuk memperoleh data primer, penulis mengadakan wawancara kepada DPRD Kabupaten Bone di kediaman beliau yang telah di sepakati. Peneliti mewawancarai dua orang dari anggota DPRD, yaitu mantan ketua DPRD Kabupaten Bone dan Wakil Ketua Komisi IV.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang peneliti butuhkan. Dalam penelitian ini, penulis mempelajari buku, jurnal, catatan internal organisasi, serta materi mata kuliah berkaitan erat dengan penelitian ini yaitu jurnal tentang analisis kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam.

Pengumpulan data adalah salah satu langkah yang tepat dan penting karena data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian akan digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Jika tidak mengetahui metode pengumpulan data, peneliti pasti tidak bisa menemukan data yang memenuhi syarat standar data yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengumpulan data akan dilakukan peneliti dalam tulisan ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Melalui teknik wawancara, peneliti melakukan proses tanya jawab dengan cara komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) menggunakan daftar wawancara. Peneliti juga menggunakan alat perekam yang sebelumnya meminta ijin agar bersedia untuk diwawancarai menggunakan alat perekam agar memperoleh hasil wawancara yang lebih akurat. Kemudian peneliti mencatat garis besar dari jawaban responden. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi penting tentang kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan menelusuri berbagai jenis kepustakaan untuk memperoleh berbagai informasi, data-data kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan (baik dalam

bentuk file, barang cetakan maupun rekaman). Hal ini diperolehnya data-data secara tertulis yang terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Bone terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan. Peneliti memperoleh informasi tertulis dari Badan Pusat Statistika mengenai tingkat kemiskinan yang akan dijadikan sumber pendukung dan peneliti menelusuri internet untuk mendapatkan informasi terkait Kebijakan Pemerintah.

III. PEMBAHASAN

Pemerintah merupakan suatu lembaga tertinggi negara yang memiliki peranan penting dalam penanggulangan tingkat kemiskinan di wilayahnya. Sebagai suatu lembaga tertinggi, pemerintah dituntut untuk semaksimal mungkin dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan juga tepat dalam upaya menekan angka kemiskinan. Supaya tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut mampu terlaksana dengan maksimal dan baik, pemerintah harus memenuhi upaya-upaya kebijakan itu sendiri. Selain itu juga pemerintah harus berperan baik secara normatif, ideal, dan faktual (Rukmi, 2017).

Upaya pemerintah terhadap mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone telah dilakukan sejak dari dulu, yang tentunya persoalan kemiskinan sering terjadi di wilayah manapun itu. Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bone sebenarnya bisa mengalami penurunan apabila masyarakatnya juga ikut serta dalam setiap proses yang diupayakan oleh pemerintah, baik dari segi financial, mentaati kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan juga dari sisi islami, serta masyarakat setempat dan juga pemerintah daerah bekerjasama untuk mencapai hasil yang baik dalam menanggulangi kemiskinan.

Seperti yang telah diketahui berdasarkan wawancara dengan pemerintah setempat DPRD Kabupaten Bone (yaitu Drs. Andi Akbar Yahya M.M dan A.Muh Salam) bahwa kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone akhir-akhir ini telah cukup baik, artinya kemiskinan di Kabupaten Bone ada pergeseran sekian persen dari sebelumnya yang dimana angka kemiskinan telah dapat ditekan. Pemerintah dapat menentukan mana masyarakat miskin melalui sumber data yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika mengenai empat belas kriteria masyarakat miskin.

Kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan memiliki upaya dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone yang tersalurkan melalui beberapa program yang telah diterima oleh masyarakat miskin. Dalam kebijakannya untuk menanggulangi kemiskinan yang merupakan salah satu prioritas utama bagi pemerintah daerah Kabupaten Bone, saat ini telah memiliki berbagai macam bentuk program untuk menanggulangi kemiskinan yang ada dimulai dari program kemiskinan yang berbasis bantuan sosial, program bantuan yang berbasis pada pemberdayaan usaha kecil, serta program bantuan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bantuan-bantuan tersebut harus diikuti dengan penyediaan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem akuntansi yang andal. Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan

implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi. Suatu studi yang menyelidiki bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok, serta struktur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dalam organisasi disebut dengan perilaku organisasi. Perilaku mengacu pada apa yang ingin dilakukan oleh orang dalam organisasi, bagaimana orang-orang tersebut dibentuk, dan apa sikap mereka. Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan peraturan tersebut maka pemerintah Kabupaten Bone mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) No.5 pasal 12 ayat (2) Tahun 2014 tentang Tim Koordinas Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pasal tersebut terdapat peraturan yang telah disebutkan bahwa, penanggulangan tingkat kemiskinan merupakan sebuah kebijakan serta program dari pemerintah daerah yang terencana, sistematis, dan juga bersinergi meliputi masyarakat setempat dan dunia usaha dalam tujuan untuk meminimalisir jumlah masyarakat miskin di suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (RI, 2020).

Selanjutnya diuraikan kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Melalui Program Bantuan Sosial

1) Program Keluarga Harapan (PKH)

Kebijakan pemerintah untuk bisa menanggulangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone telah terlaksana, salah satunya dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang termasuk program bantuan kluster satu. Adanya program keluarga harapan ini ditujukan agar mampu mengurangi beban masyarakat miskin dalam kebutuhannya yang sulit dipenuhi.

Program penanggulangan tingkat kemiskinan kluster satu adalah suatu program bantuan sosial terpadu yang berbasis keluarga, memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan kualitas hidup, pemenuhan hak dasar, serta pengurangan beban hidup masyarakat miskin yang ditujukan untuk dalam pemenuhan pendidikan dan pelayanan kesehatan. (TNP2K, 2012). Dapat kita lihat bahwa pemerintah tidak hanya memberikan bantuan dari segi bahan pokok untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi pemerintah juga memperhatikan pendidikan serta kesehatan masyarakatnya yang kurang mampu dalam memenuhi hak tersebut.

Pada pelaksanaan program bantuan PKH di Kabupaten Bone, memiliki seorang personel dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) yaitu pendamping PKH. Kehadiran pendamping sangat dibutuhkan untuk membantu para peserta penerima PKH pada setiap kecamatan dalam memperoleh hak yang selayaknya diterima oleh penerima program bantuan PKH. Selain dari kepentingan peserta penerima program bantuan, para pendamping memiliki tugas pokok yang diantaranya registrasi, penggantian data, pengaduan, informasi, validasi, dan verifikasi. Tugas pokok pendamping ini membantu peserta penerima program bantuan dalam mendeteksi masalah dan juga melakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat.

Berkaitan dengan program bantuan untuk menanggulangi tingkat kemiskinan, mendapatkan respon dari masyarakat karena dengan adanya program bantuan yang

diberikan oleh pemerintah sangat membantu perekonomian masyarakat miskin. Mereka terbantu dalam membiayai kebutuhan pangan, biaya pendidikan anak, dan juga biaya kesehatan. Perlu diketahui bahwa dalam bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan, hal ini perlu juga diseimbangkan dengan usaha masyarakat untuk bisa mensejahterakan hidupnya.

Program PKH memiliki kategori tersendiri yang berhak mendapatkan bantuan. Alasan mengapa adanya kategori yang diberikan pemerintah karena pemerintah ingin program bantuan ini tepat sasaran pada masyarakat yang patut diberikan bantuan yang sesuai dengan kategori yang telah diberikan (Wahdaniah, 2021). Adapun kategori yang berhak menerima bantuan PKH ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1
Kategori Penerima Bantuan Sosial PKH

No.	Kategori	Jumlah
1.	Ibu Hamil/Nifas	Rp. 3.000.000,-
2.	Anak Usia Dini 0 s.d 6 Tahun	Rp. 3.000.000,-
3.	Pendidikan Anak SD/Sederajat	Rp. 900.000,-
4.	Pendidikan Anak SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000,-
5.	Pendidikan Anak SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000,-
6.	Penyandang disabilitas Berat (Tidak dapat melakukan aktifitas tanpa bantuan orang lain)	Rp. 2.400.000,-
7.	Lanjut Usia 70 thn	Rp. 2.400.000,-

Sumber data: Kategori penerima bantuan

Baru pada tahun 2010 Kabupaten Bone telah menjadi salah satu wilayah penerima program bantuan PKH. Terkait dengan adanya bantuan ini memiliki tujuan yang ada dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu dapat meningkatkan kondisi ekonomi (KPM), dapat meningkatkan taraf pendidikan bagi anak-anak masyarakat miskin yang perlu bantuan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan serta nilai gizi bagi ibu hamil atau nifas dan anak dibawah usia 6 tahun, dan juga kualitas serta akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.

2) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam program sosial selanjutnya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang merupakan suatu bentuk dari upaya-upaya pemerintah agar dapat memberikan bantuan untuk mengurangi beban-beban masyarakat miskin dalam hal pengeluaran yang pokok. Dengan adanya program ini pemerintah mengharapkan agar program bantuan dapat memberikan masyarakat miskin manfaat secara nyata untuk mengurangi pengeluaran masyarakat miskin. Adapun pemberian bantuan pemerintah yang telah diterapkan yaitu pemberian bantuan beras untuk masyarakat miskin yang mendapat bantuan ini.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah diatur kedalam Peraturan Presiden Nomor 63 Pasal 2 ayat (2) tahun 2017 yang membahas mengenai penyaluran bantuan sosial secara non tunai yang menyebutkan bahwa pada penyaluran bantuan sosial secara

non tunai dilakukan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemberi bantuan sosial.(INDONESIA, 2017).

Program BPNT telah diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2018. BPNT memiliki tujuan dalam menanggulangi tingkat kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan nutrisi yang lebih seimbang, dan dapat memberikan lebih banyak lagi pilihan serta kendali kepada KPM untuk memenuhi kebutuhan pangan. Manfaat pada program bantuan BPNT bagi masyarakat miskin yaitu agar dapat meningkatkan ketahanan pangan serta sebagai mekanisme perlindungan sosial, dan penanggulangan tingkat kemiskinan, dapat memberikan peningkatan pada akses masyarakat terhadap layanan keuangan agar kemampuan ekonomi dapat meningkat juga, pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan di daerah terutama pada usaha mikro dibidang perdagangan.

Bantuan BPNT hanya dapat ditukarkan dengan makanan pokok seperti beras atau telur sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin yang menerima bantuan ini dan bantuan ini tidak bisa diambil dalam bentuk tunai. Bantuan ini juga bisa disimpan sebagian ke dalam rekening masyarakat yang menerima bantuan untuk digunakan lagi sebelum jadwal penyaluran pada bulan selanjutnya. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah salah satu media pemberdayaan yang dibuat khusus untuk membangun kemampuan pada masyarakat miskin dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Dimensi ekonomi dan sosial telah menjadi pilar inti dari kegiatan KUBE. Yang secara sosial, telah menjadi tempat atau wadah bergabungnya masyarakat miskin, sehingga memungkinkan bagi mereka dapat melakukan interaksi sosial yang baik dan positif (Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2011).

Pemerintah daerah Kabupaten Bone memiliki kriteria dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh individu atau kelompok apabila ingin mendapatkan saluran bantuan pada program KUBE, diantaranya memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha, memiliki keterbatasan dalam akses seperti modal, dan lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar program bantuan KUBE yang ditujukan dapat tepat sasaran, sehingga dapat berjalan dengan baik. setelah itu bagi masyarakat yang nantinya akan segera diberikan bantuan pada program ini, maka sangat diharapkan mampu mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone. Adapun tujuan lain dari program KUBE ini yang diharapkan dapat tepat sasaran adalah terjadinya peningkatan pendapatan, kemampuan masyarakat dalam berusaha, serta usaha yang dimiliki dapat berkembang dengan baik.

Membahas mengenai program bantuan yang diharapkan tepat sasaran dalam sebuah program bantuan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bone, ketetapan sasaran pada setiap dilaksanakannya program bantuan telah menjadi salah satu bagian aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program bantuan untuk bisa tercapainya sebuah tujuan. Begitupula pula pada bantuan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program kelompok usaha bersama (KUBE) yang merupakan salah satu dari kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi tingkat kemiskinan, bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat miskin yang masuk kriteria yang sangat butuh bantuan dari pemerintah. Demikian halnya dengan program Kelompok Usaha Bersama yang

faktor keberhasilannya sangat ditentukan dari berbagai aspek, misalnya salah satunya yaitu mengenai anggaran atau pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program bantuan ini. Adapun pada bantuan anggaran dalam hal ini pada pernyataan dari A.Muh Salam (anggota DPRD Kabupaten Bone) mengatakan bahwa anggaran di dapatkan dari bantuan dana Kementerian Sosial.

Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha yang pastinya berperan besar dan kontribusi serta dapat memacu perekonomian secara regional bahkan nasional. Sektor usaha juga telah unggul dalam memberikan peluang bagi tenaga kerja dengan tetap menggunakan sumber daya lokal sehingga dapat menjadi pilar dalam sendi perekonomian suatu daerah.

Penanggulangan tingkat kemiskinan merupakan bentuk upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam perekonomian agar mampu menekan dan mengurangi angka pengangguran serta angkat kemiskinan. Pemerintah bukan hanya berfokus pada program bantuan dalam bentuk kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi pemerintah juga memiliki fokus pada sumber pendapatan masyarakat miskin guna kiranya bisa menopang kehidupannya agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone dalam upaya menanggulangi tingkat kemiskinan sangat membantu, tidak hanya memberikan bantuan bersifat konsumtif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat miskin sebagai suatu jaring pengaman sosial. Program bantuan juga dapat bersifat produktif yang ditujukan untuk membantu memberikan modal kepada masyarakat yang memiliki ekonomi lemah.

Pada program bantuan ini agar dilakukannya tepat sasaran, maka pemerintah menetapkan syarat dan kriteria tertentu, diantaranya yaitu: punya usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan serta pemohon tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya. Implementasi kebijakan pemerintah daerah adalah bentuk upaya yang dilakukan pemerintah daerah agar tujuan yang sudah di tetapkan pada keputusan kebijakan pemerintah dapat tercapai sesuai dengan keinginan. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone melalui program-program yang ada dikatakan masih kurang efektif dan tepat sasaran, alasannya karena pemerintah masih menggunakan data sensus penduduk yang ternyata belum diperbaharui oleh pusat yakni Kementerian Sosial. Kemensos masih menggunakan data lama tahun 2015. Hal ini terbukti karena masih adanya masyarakat yang miskin butuh bantuan namun belum atau tidak mendapatkan program bantuan, serta pada penyaluran bantuan yang diberikan untuk masyarakat miskin juga belum merata. Mengenai masalah pada keterbatasan jaringan di desa juga menjadi sumber hambatan proses penyaluran bantuan dari pemerintah untuk masyarakat miskin.

Berbagai kebijakan melalui program pemerintah sepanjang ini sudah dilaksanakan dalam rangka untuk menanggulangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone, antara lain: bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Tetapi dalam implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bone terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan melalui upaya program bantuan yang telah ada terdapat faktor yang mendukung maupun menghambat dalam prosesnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Melalui Program Bantuan Sosial

1) Faktor Pendukung dan Penghambat Program Keluarga Harapan

a) Faktor Pendukung

Terlaksananya program bantuan PKH tidak luput dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi tingkat kemiskinan. Pada hal ini yang menjadi faktor pendukung berjalannya PKH di Kabupaten Bone yaitu: Pertama, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk keberhasilan program bantuan PKH agar dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat yang ada di Kabupaten Bone.

Kedua, masyarakat sebagai merupakan peserta penerima program bantuan PKH juga memiliki komitmen untuk tetap tertib dalam melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan menyekolahkan anaknya demi menempuh pendidikan yang baik. Ketiga, adanya koordinasi yang cukup baik diantara pelaksana program bantuan PKH. Para pelaksana yang dimaksud adalah perangkat daerah, sedangkan pada bidang pendidikan adalah guru atau wali kelas, dan dalam bidang kesehatan pelaksana yang terlibat adalah bidan.

b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah patokan bagi pemerintah untuk bisa membuat program bantuan menjadi lebih baik lagi dan memudahkan masyarakat. Adapun faktor penghambat pada pelaksanaan program bantuan PKH yaitu: Pertama, adanya pemahaman yang minim pada masyarakat miskin dalam sanksi yang diberikan apabila diketahui melanggar kewajiban ataupun komitmen yang sudah ditetapkan dalam syarat pangan, kesehatan maupun pendidikan. Kedua, kurangnya dukungan dari segi finansial seperti dana. Pada pelaksanaan program bantuan PKH, proses pendanaannya merupakan sebuah hal penting bagi penentu keberhasilan. Maka dari itu diperlukannya dukungan anggaran yang cukup.

2) Faktor Pendukung dan Penghambat Bantuan Pangan Non Tunai

a) Faktor Pendukung

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bone terdiri dari ketersediaan syarat, proses penyaluran sampai dengan tujuan dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urain tersebut sejalan dengan Kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai masyarakat miskin.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dimaklumi bahwa pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bone terdiri dari ketersediaan syarat, proses penyaluran bantuan dari pemerintah hingga tujuan tercapainya kesejahteraan yang meningkat pada masyarakat miskin. Penggambaran tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap masyarakat miskin.

Terdapat faktor pendukung dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah Kabupaten Bone terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan, yaitu: Pertama, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk

keberhasilan program BPNT agar dapat memberikan bantuan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bone; Kedua, adanya komitmen dari para peserta program bantuan BPNT untuk tertib menjalankan proses pendataan penerima bantuan; Ketiga, mampu meringankan beban masyarakat miskin dengan adanya program BPNT.

b) Faktor Penghambat

Proses kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bone terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan tidak terlepas dari faktor yang dapat menghambat proses keberlangsungan program bantuan. Sisa bagaimana kita memperbaiki agar faktor penghambat dalam proses pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dapat teratasi. Adapun faktor penghambat proses pemberian BPNT, yaitu: pertama, Kondisi akses jalan yang menyulitkan dan juga berada jauh dari pusat layanan bank serta akses internet yang mengakibatkan peserta penerima BPNT sulit untuk mencairkan uang bantuan; kedua, penerapan kebijakan pemerintah dari program BPNT di Kabupaten Bone sebenarnya masih kurang mampu dalam mengatasi masalah kemiskinan, karena masih adanya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan ini, dikarenakan belum terdaftar pada peserta penerima program bantuan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (KUBE)

1) Faktor Pendukung

Program bantuan ini juga tidak terlepas dari faktor pendukung yang menjadi keberhasilan terlaksananya program KUBE. Dimana faktor pendukung yaitu: pertama, semua pihak yang terkait dalam berlangsungnya program bantuan ini terjalin kerjasama yang baik dalam menjalankan program bantuan KUBE yang ada di Kabupaten Bone; kedua, terdapat keinginan untuk mengikuti setiap kegiatan dalam proses berlangsungnya program bantuan. Dengan adanya partisipasi anggota dalam setiap kegiatan program ini, yaitu program bantuan KUBE merupakan suatu bentuk dari kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan dan perubahan.

2) Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program bantuan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) yaitu: pertama, tidak terealisasinya program tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya masyarakat yang mengetahui adanya program bantuan KUBE. Yang dimana program ini memiliki kriteria khusus, misalnya keinginan dan kapasitas agar usaha bersama yang dimiliki dapat berkembang; kedua, kurangnya SDM yang memuaskan atau kualitas SDM yang kurang. SDM merupakan sesuatu yang penting dan menjadi salah satu variabel yang dapat mempengaruhi terlaksananya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan. Seperto yang dikatakan oleh Bapak Andi Patimbangi, S.Pd.,M.Pd. dalam penelitiannya mengatakan bahwa kemampuan untuk bisa memanfaatkan serta bisa mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ditentukan oleh kualitas SDM. Agar masyarakat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu hal yang menopang kualitas SDM adalah

pendidikan (Patimbangi & Hendi, 2019); ketiga, adanya keterbatasan dalam anggaran dana yang dimiliki. Tentu mengenai persoalan dana merupakan masalah yang paling utama, karena hal ini dapat menentukan berhasilnya program pemerintah dengan mencapai tujuan yang diinginkan. Tanpa sumber subsidi dan perencanaan yang besar, pelaksanaan suatu program akan menemui hambatan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan UMKM

1) Faktor Pendukung

Salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone adalah melalui program pemberdayaan UMKM. Pelaksanaan program ini memiliki faktor-faktor yang dapat menopang hasil program ini, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Dalam penelitian ini, unsur-unsur pendukung untuk pelaksanaan program adalah:

Pertama, terdapat respon yang baik bagi masyarakat penerima program bantuan UMKM. Para pelaku UMKM yang sangat membutuhkan bantuan ini sudah cukup membantu mereka dalam menjalankan usaha yang dimiliki; kedua, adanya teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM agar dapat mengembangkan dan membantu usaha mereka agar bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat sehingga menghasilkan dampak yang baik pada keuntungan penjualan yang meningkat.

2) Faktor Penghambat

Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan UMKM ini, juga terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini.

Pertama, kurangnya SDM yang memuaskan atau kualitas SDM yang kurang. SDM merupakan sesuatu yang penting dan menjadi salah satu variabel yang dapat mempengaruhi terlaksananya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan. Kurangnya kualitas SDM dari segi pendidikan maupun pengetahuan dan juga keterampilan sangat memberikan dampak pengelolaan usaha, sehingga usaha yang dijalankan susah untuk bisa berkembang; kedua, minimnya kemampuan atau skill penerima program bantuan UMKM dalam membentuk terobosan baru yang bersifat ekonomi kreatif dan juga inovatif. Penerima program bantuan UMKM harus memiliki informasi yang bagus tentang metode yang paling mahir untuk membuat produk kreatif dan cara memamerkan produknya.

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang amat rumit. Secara sosial, Islam menganjurkan untuk mengembangkan kualitas hidup setiap orang dalam meningkatkan fitrah hidupnya dan membina jalannya kerukunan sosial melalui zakat, infaq, dan shadaqah. Secara struktural, Islam memberikan peran negara dalam membangun pendapatan dan kekayaan masyarakat dengan adil dan juga merata serta menjaga agar tetap stabil.

Sehingga dengan demikian, kebijakan pemerintah menjadi hal yang sangat perlu dalam hal ini. Sesuai dalam UUD 1945 mengatakan bahwa, "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" (Pasal 34 ayat 1). Penanggulangan tingkat kemiskinan dalam Islam bahwa kemiskinan tidak bisa dihilangkan, akan tetapi kemiskinan masih bisa diminimalisir.

1) Kewajiban setiap individu

Cara paling penting yang diajarkan Al-Qur'an untuk menanggulangi kemiskinan adalah kerja dan usaha yang dituntut pada setiap orang mampu. Dalam Islam setiap individu yang hidup di bumi diharapkan bekerja atau menghasilkan uang untuk mengatasi masalah hidupnya sendiri dan orang yang dicintainya. Hal ini terkait dengan program bantuan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone untuk mengurangi tingkat kemiskinan, dimana meskipun masyarakat miskin mendapatkan bantuan, mereka sebenarnya perlu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini dikarenakan bantuan yang diberikan hanya untuk membantu meringankan kebutuhan pangan, kesejahteraan, sekolah dan bantuan sosial pemerintah dan bukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat kurang mampu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari kewajiban individu sudah memenuhi usaha terhadap pengentasan kemiskinan dalam Islam.

2) Kewajiban bagi Masyarakat

Mengatasi kemiskinan pada ajaran Islam yaitu memberikan perintah kepada setiap masyarakat untuk memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peraturan, yaitu saling mencukupi serta menjamin. Maksudnya adalah Islam telah memberikan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. Al-Quran menganjurkan sumbangan secara sukarela tanpa paksaan.

Berdasarkan kewajiban masyarakat, Islam tentunya telah memberikan perintah kepada setiap masyarakat untuk tetap menjalankan kewajibannya seperti pada aturan yang telah ada, hanya saja masyarakat yang menerima bantuan tidak melaksanakan kewajibannya yang telah diberikan sebagai penerima bantuan dari pemerintah, jadi usaha penanggulangan tingkat kemiskinan dalam Islam belum bisa terlaksana. Harusnya para penerima program bantuan dari pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban sebagai penerima program bantuan agar usaha penanggulangan tingkat kemiskinan dapat berjalan dengan baik.

3) Kewajiban bagi Pemerintah

Pemerintah dalam Islam juga memiliki kewajiban terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan. Akan tetapi mengenai kemiskinan memang tidak dapat dihilangkan begitu saja, adanya program bantuan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone merupakan suatu bentuk kebijakannya dalam menanggulangi tingkat kemiskinan hanyalah untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone. Adapun program bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat miskin yaitu pangan, kesehatan, pendidikan, dan bantuan usaha. Pada bantuan usaha meliputi KUBE dan UMKM dijadikan wadah untuk membuka atau mengembangkan usaha masyarakat yang menerima bantuan ini agar dapat menanggulangi tingkat kemiskinan. Hal ini terlaksana dengan usaha kemiskinan dalam Islam yang dimana bukan hanya membantu dari segi konsumsi akan tetapi juga membantu dari segi pendapatan.

IV. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bone terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan sebenarnya dapat dilihat program bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin. Program bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bone

untuk masyarakat miskin yang tergolong dalam bantuan sosial meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE), dan bantuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pelaksanaan program bantuan dari pemerintah setempat untuk sasaran utamanya yakni masyarakat miskin berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasilnya adalah pada pelaksanaan bantuan terdapat hal yang menyebabkan kurang maksimal yang tentunya dipengaruhi oleh faktor. Akan tetapi dalam pelaksanaan program bantuan secara menyeluruh sudah cukup baik, terlihat dengan terlaksananya program bantuan yang ditujukan untuk masyarakat miskin dapat tersalurkan sesuai dengan kriteria yang ada serta pelaksanaannya.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone terhadap Penanggulangan Tingkat Kemiskinan yaitu pada saat dilaksanakannya program bantuan pemerintah daerah untuk menanggulangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone terdapat faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukungnya meliputi komitmen yang baik antara pemerintah, terdapat koordinasi yang baik diantara semua pihak, serta terciptanya motivasi pada diri setiap individu untuk dapat melaksanakan kegiatan program bantuan. Selanjutnya pada faktor penghambat program bantuan yaitu minimnya pemahaman masyarakat miskin terhadap sanksi jika masyarakat miskin yang menerima bantuan melanggar kewajiban, terdapat hubungan kurang baik antara sesama individu, kemampuan yang kurang dimiliki oleh pelaku program bantuan UMKM, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone terhadap Penanggulangan Tingkat Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam islam setiap individu dianjurkan untuk bisa menumbuhkan peran masing-masing individu untuk kualitas hidup yang lebih baik dan memberikan kebersamaan dalam kegiatan sosial melalui zakat, infaq, dan shadaqah. Dimana pemerintah telah melaksanakan tugasnya sebagai pemerintahan yang sesuai dengan ajaran islam untuk membantu dan menolong masyarakat miskin yang kekurangan. Dalam Islam, Pemerintah memiliki peran yaitu wajib dalam menanggulangi tingkat kemiskinan pada daerah yang dipimpin. Bantuan program yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pangan, kesehatan, pendidikan, dan bantuan usaha. Pada bantuan usaha meliputi KUBE dan UMKM bisa dijadikan untuk membuka usaha yang dapat menanggulangi tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- INDONESIA, P. R. (2017). PERATURAN RI NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL. *Undang - Undang Republik Indonesia*, 1–14.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama Sejahtera*.
- Patimbangi, A., & Hendi, F. (2019). Pengaruh Konsep Diri dan Kebiasaan Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP YP PGRI 4

MAKASSAR. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 17(2), 615–625.
<https://doi.org/10.30863/ekspose.v17i2.118>

RI, M. D. N. (2020). Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiski. *Kemerkumham RI*, 7(53), 1–17.

Rheny Afriana Hanif, R. Adri Satriawan Dan Triyanto Hadi Saputra. (2014). *Pengaruh Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Dengan Konflik Kognitif Dan Afektif Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Rumah Sakit Pemerintah Di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ekonomi* Volume 22, Nomor 2 Juni 2014.

Rukmi, D. S. (2017). *Peran dan upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan di Kelurahan Danau Tundai dalam tinjauan ekonomi islam*. <http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/1102/>

TNP2K. (2012). Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Rapat Kerja Teknis TNP2K*, 2–3.

Wahdaniah, A. (2021). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) ERA COVID 19 DI DESA LATELLANG KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE Oleh : A . WAHDANIAH Nomor Induk Mahasiswa : 105611129717 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA*.

Yulistia, Novi Yanti, Ika Purwasih. “Analisis Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”. *Jurnal Benefita* 2(3) Oktober 2017 (179-193)

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.